

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis perbuatan korporasi yang bagaimana yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara kebakaran hutan dan lahan berdasarkan Perspektif Perundang-Undangan. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis cara untuk menentukan kesalahan korporasi dan sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada korporasi sebagai dasar pertanggungjawaban pidana korporasi. Dengan Tujuan tersebut, maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana perbuatan korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara kebakaran hutan dan lahan? 2) Bagaimana cara menentukan kesalahan korporasi dan sanksi pidana yang dapat diterapkan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana korporasi? Dengan perumusan masalah tersebut, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasi dan menginterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengaturan tanggung jawab pidana korporasi dalam perkara kebakaran hutan dan lahan terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, dan Undang-Undang Perkebunan. Sifat pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana terdapat tiga model pertanggungjawaban: Pengurus korporasi sebagai pembuat, pengurus yang bertanggungjawab, Korporasi sebagai pembuat, pengurus yang bertanggungjawab, dan Korporasi sebagai pembuat juga bertanggungjawab. Untuk menentukan siapa yang dapat bertanggungjawab, maka korporasi tersebut harus diuji terlebih dahulu unsur kesalahannya terpenuhi atau tidak. 2) Cara menentukan kesalahan korporasi: apabila korporasi terbukti melakukan tindak pidana dan melihat apakah pada diri pengurus korporasi bertindak atas nama dan untuk kepentingan korporasi serta terdapat unsur kesengajaan/kealpaan. Sanksi pidana dalam perkara kebakaran hutan dan lahan adalah pidana penjara dan pidana denda berdasarkan UUPPLH terdapat dalam Pasal 108, Undang-Undang Kehutanan terdapat dalam Pasal 78, Undang-Undang Perkebunan terdapat dalam Pasal 108, apabila dilakukan oleh korporasi, maka ditambah sepertiga pidana denda. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Penulis merekomendasikan kepada pembuat kebijakan untuk merevisi mengenai: 1) Pengkajian kembali izin korporasi serta mempertimbangkan kelayakannya sehingga dalam penegakkannya korporasi dianggap mampu bertanggungjawab secara hukum. 2) Kelengkapan sarana dan prasarana untuk pengendali kebakaran hutan mengingat lamanya waktu untuk memulihkan kembali lahan yang rusak akibat kebakaran.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Sanksi Pidana Korporasi, Kebakaran Hutan dan Lahan.

CORPORATE CRIMINAL LIABILITY IN CASES OF FOREST AND LAND FIRES BASED ON THE STATUTORY PERSPECTIVE

ABSTRACT

This study aims to: 1) Find out and analyze what kinds of corporate actions can be criminally responsible in cases of forest and land fires based on the Statutory Perspective. 2) Find out and analyze how to determine corporate mistakes and criminal sanctions that can be applied to corporations as the basis for corporate criminal liability. Therefore, the issues discussed were: 1) What are the corporate actions of that can be criminally accounted for in cases of forest and land fires? 2) How to determine corporate mistakes and criminal sanctions that can be applied as the basis for corporate criminal liability? Through the formulation of the problem, the research methods used were normative juridical research with a statute approach, a case approach, a historical approach, and a conceptual approach. The legal materials collected were primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The analysis of the collected legal materials was conducted by taking inventory, systematizing and interpreting. The study has resulted that: 1) Regulation of corporate criminal responsibility in forest and land fire case is contained in environmental protection and management laws, forestry laws, plantation laws. The nature of corporate liability as a criminal offender there are three models of liability: Corporate management as the responsible maker and management, Corporation as the responsible maker and management, Corporation also as responsible maker. There are two forms of corporate responsibility in the theory of criminal responsibility, which are liability with errors and liability without errors. To determine who can be responsible, the corporation must first be tested whether the element of error is met or not. 2) How to determine corporate error: if the corporation is proven to have committed a criminal act and see whether the corporate management acts on behalf of and for the benefit of the corporation and there is an element of intent/negligence. Criminal sanctions in cases of forest and land fires shall be imprisonment and fines under the environmental protection and management law article 108, forestry law article 78, plantation law article 108, if committed by a corporation plus one-third of the fine. Based on the conclusions above, the author recommends to policy makers to revise regarding: 1) Reviewing corporate permits and considering their feasibility so that in its enforcement the corporation is considered capable of being legally responsible. 2) Comprehensiveness of facilities and infrastructure to control forest fires considering that it takes long time to restore land damaged by fire.

Keywords: Corporate Criminal Liability, Corporate Criminal Sanctions, Forest and Land Fires.